



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

SELASA, 24 APRIL 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Terus Bidik Temuan BPK di Benteng

Ditemukan yang Melawan Hukum

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, M.Hum melalui Aspidus Kejati Hendri Nainggolan SH, MH mengatakan, kasus dugaan penyelewengan anggaran sesuai dengan temuan BPK senilai Rp 9 Miliar di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) tahun 2016 sejauh ini proses Penyelidikan terus berlanjut.

"Kasus temuan BPK Rp 9 miliar di Benteng itu, sudah ditindak lanjuti sekitar 70 persen. Dalam penindakan itu ada beberapa barang bukti yang berhasil kita temukan, yang hingga sekarang masih dalam pengejaran kita," ucapnya Senin, (23/4).

Dikatakan Hendri, sejauh ini informasi terkait dengan temuan BPK senilai Rp 9 miliar itu, berasal dari perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Benteng, Sekretariat Dewan (Setwan), dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Ben-

teng tahun 2016 lalu. "Hingga sekarang kita masih memintai keterangan kepada beberapa orang saksi yang kita anggap mengetahui terkait dengan permasalahan ini. Kalau tidak ada kendala lain mungkin secepatnya kita temukan orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini," pungkasnya. Untuk diketahui, sebelumnya, mantan Plt Sekda Kabupaten Benteng, Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemkab Benteng, sudah dipanggil tim penyidik Kejati Bengkulu untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara tersebut. Selain dari itu, tidak menutup kemungkinan juga pejabat-pejabat yang

ada di Kabupaten Benteng juga bakal dipanggil terkait dengan perkara ini. Sebab, menurutnya, tindak lanjut atas temuan BPK tersebut sudah melewati batas waktu. Dan perkara ini dipastikan akan terus diusut.

"Semua yang ada kaitannya dengan perkara ini dipastikan akan kita panggil.

Nantilah kita lihat perkembangannya, dan siapa yang akan kita panggil selanjutnya. Karena batas waktu sudah diberikan oleh BPK tetapi mereka tidak menjalankan instruksi BPK itu. Sekarang kita sudah menemukan beberapa yang menjangkal atau melawan hukum," demikian ucapnya.(ide)